

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan perindustrian dan ekonomi suatu negara maka perlu dibutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya dapat dipenuhi dengan memberdayakan secara maksimal sumber – sumber dana tersebut. Sumber dana yang utama dan terpenting adalah lembaga perbankan, lembaga keuangan serta koperasi ¹. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa :

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Dalam Peran Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koperasi Simpan Pinjam menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam upaya memperbaiki taraf hidup, pemenuhan kebutuhan sehari – hari dan mengembangkan usaha². Sesuai dengan Undang - Undang nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa cakupan usaha koperasi menjadi luas, tidak hanya melayani kebutuhan anggota, tetapi juga masyarakat pada umumnya, maka Koperasi Simpan Pinjam pun juga

¹ Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah & Ahmad Jalis, 2008, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta : Kencana, Hal. 17.

² Tatik Suryani, Sri Lestari & Wiwik Lestari, 2008, *Manajemen Koperasi : Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayanan Prima dan Pengelolaan SDM*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hal. 1

mempunyai nasabah yang tidak hanya terbatas pada anggota, tetapi juga masyarakat umum³. Tujuan dari pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan⁴, pernyataan mengenai tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang berbunyi :

“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Hadirnya koperasi merupakan salah satu jawaban dari persoalan – persoalan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat lemah, pengusaha kecil dan menengah”.

Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka perlu dilakukannya program - program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satunya adalah program pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya⁵. Dalam hal ini koperasi kredit dapat dibentuk pada setiap bidang usaha atau koperasi. Kegiatan simpan pinjam diorganisasikan dalam koperasi kredit amat diperlukan pada koperasi konsumsi, koperasi penjualan, koperasi jasa maupun koperasi produksi⁶. Dasar dari suatu perjanjian kredit adalah diatur dalam pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor . 02/PER/M.KUKM/II/2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dijelaskan bahwa :

³ *Ibid*, Hal.2

⁴ Subandi, 2017, *Ekonomi Koperasi : Teori dan Praktik*, Bandung : Alfabeta, Hal.21.

⁵ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, Hal. 19.

⁶ Hudiyanto, 2002, *Sistem Koperasi : Ideologi dan Pengelolaan*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, Hal. 69.

“Kredit atau Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan”.

Lembaga Perbankan, lembaga keuangan serta koperasi dan dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada pihak – pihak yang membutuhkan dana tidaklah mudah, karena harus memenuhi persyaratan – persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan. Salah satu persyaratan terpenting untuk memperoleh fasilitas kredit adalah adanya jaminan dan agunan. Dan dalam perkembangannya jaminan dan agunan tersebut haruslah barang – barang yang bermutu tinggi dan mudah diperjualbelikan⁷.

Tidak dapat disangkal, bahwa pembangunan ekonomi diberbagai sektornya, terutama kegiatan – kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit dan pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikan kepada debitur dapat dikembalikan segala pinjamannya secara teratur dan lancar sesuai jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

⁷ Abdul R Saliman, Hermansyah & Ahmad Jalis, 2008, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta : Kencana, Hal. 17

Dengan perkataan lain, pihak pemilik dana (kreditur), kreditur mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya. Oleh karena itu, keberadaan suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai lembaga jaminan itu sangatlah diperlukan dengan Undang – Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah serta Benda – Benda yang berkaitan dengan tanah yang mulai berlaku sejak tanggal 9 April 1996⁸. Jaminan Kredit dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan sendiri dapat berupa harta milik debitur atau harta milik pihak ketiga yang digunakan untuk memperkuat nilai jaminan debitur. Sedangkan jaminan perorangan adanya orang yang ditunjuk oleh debitur dan dapat diterima oleh kreditur, bertindak sebagai penjamin pembayaran kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kredit⁹. Dalam hal ini peneliti meneliti Perjanjian Kredit dengan jaminan kebendaan.

Salah satu kebendaan yang dapat dijadikan jaminan adalah tanah. Hak kebendaan atas tanah ditandai dengan sertifikat hak atas tanah maka sertifikat hak atas tanah juga dapat dijadikan jaminan kebendaan, karena tanah memiliki nilai dan atau harga yang tinggi dan terus meningkat. Sehingga dalam hal ini sudah selayaknya apabila debitur sebagai penerima kredit dan Kreditur sebagai pemberi fasilitas kredit serta pihak lain memperoleh perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum.

⁸ Ibid, Hal 18

⁹ Siswanto Sutojo, 2000, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, Jakarta : Damar Mulia Pustaka, Hal. 214.

Hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang utama kepada kreditur tertentu kepada kreditur – kreditur yang lain. Untuk memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk suatu perlindungan hukum, maka hak tanggungan ini wajib didaftarkan di kantor pertanahan, guna memenuhi unsur publikasi atas barang jaminan, dan mempermudah pihak ketiga mengontrol apabila terjadi pengalihan benda jaminan.

Perjanjian kredit menurut islam terdapat dalam HR. Bukhori Nomor 2393 yang berbunyi :

“Sesungguhnya yang paling diantara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang”.

Berdasarkan hadist tersebut, islam telah mengajarkan bahwa dalam perjanjian kredit seorang debitur atau yang berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya, bahkan dalam hadist diatas dijelaskan bahwa yang paling diantara kalian adalah yang paling baik membayar hutang, maka dapat diartikan bahwa orang yang paling baik dalam hal menjalankan perjanjian kredit adalah orang yang mampu melunasi hutangnya dengan baik sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Utama Karya – Boyolali. Lazimnya

jaminan yang berkaitan dengan tanah dapat mempunyai kekuatan eksekutorial apabila dibebani dengan hak tanggungan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah sehingga akan memiliki kekuatan eksekutorial dan mempunyai kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penulisan selanjutnya yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH (STUDI PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SIMPAN PINJAM UTAMA KARYA – BOYOLALI)”**

B. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu pembatasan masalah atau ruang lingkup permasalahan pada suatu obyek yang akan diteliti, karena akan mempermudah penulis dalam mengumpulkan data. Penelitian ini dibatasi dengan hanya melakukan penelitian tentang Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah di Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya yang beralamat di boyolali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka muncul suatu permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak atas tanah di Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya – Boyolali ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah di Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya – Boyolali ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirinci tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mendeskripsikan konstruksi hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak atas tanah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Utama Karya – Boyolali.
 - b. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak atas tanah di Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama (KSP) Utama Karya – Boyolali.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk mengetahui dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan yang diperoleh peneliti dalam bidang hukum perdata mengenai perjanjian.
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Penulis mengharap adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, adanya manfaat yang didapat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan dan menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum di Indonesia, di bidang hukum perdata, terutama terkait mengenai Perjanjian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Hak atas Tanah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Utama Karya – boyolali.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan wawasan mengenai Perjanjian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah di Koperasi.

E. Kerangka Pemikiran



Dalam rangka pembangunan industri dan ekonomi dalam suatu negara dibutuhkan dana yang besar. Sumber dana utama dan terpenting adalah dari perbankan dan perkoperasian. Dalam hal ini koperasi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan koperasi menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan dana dalam upaya memperbaiki taraf hidup, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan usaha. Maka masyarakat membutuhkan pinjaman atau debitur kepada koperasi selaku pihak kreditur berupa pinjaman kredit.

Dalam melakukan pinjaman kredit yang dilakukan oleh kreditur dan debitur maka lahir suatu perjanjian. Perjanjian adalah persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih dimana masing-masing berjanji akan mentaati apa yang disebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan bersama, persetujuan atau kesepakatan resmi antara dua orang atau pihak atau negara atau lebih dalam bidang – bidang tertentu. Perjanjian kredit secara formal dibuat secara tertulis, karena perjanjian adalah bukti otentik. Batasan perjanjian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembuatan suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian, yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif. Syarat mengenai pihak – pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Sedangkan syarat 3 dan 4 merupakan syarat obyektif.

Pemberian Kredit, Koperasi selaku pihak kreditur memerlukan kepastian dan keyakinan bahwa kredit atau dana yang diberikan akan dikembalikan secara lancar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Jaminan dalam penelitian ini adalah jaminan kebendaan yang mana dijelaskan bahwa obyeknya berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh kreditur. Barang yang dijaminakan dalam hal ini sertifikat hak atas tanah yang merupakan benda tidak bergerak itu milik debitur dan selama menjadi jaminan utang tidak dapat dipindahtangankan baik debitur maupun kreditur. Apabila debitur wanprestasi atas utangnya, obyek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditur, karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik suatu barang¹⁰.

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan para pihak, dengan demikian maka bentuknya juga tergantung kepada para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Suatu perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis, asalkan pada pokoknya telah memenuhi syarat – syarat dalam membuat perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara

¹⁰ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana, Hal.59.

diatas. Dalam hal ini perjanjian kredit dibuat secara tertulis. Hal ini karena dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat pembuktian apabila kemudian hari terjadi masalah. Akan berbeda apabila perjanjian dibuat secara tertulis yang mana lebih memudahkan para pihak dalam mengingat isi perjanjian tersebut mengenai hak dan kewajiban para pihak. Namun bagaimanapun perjanjian kredit yang dibuat secara lisan tetap diakui sebagai bentuk perjanjian kredit, sepanjang dapat dibuktikan dengan baik oleh para pihak¹¹.

Dalam perjanjian kredit, maka masing – masing pihak mempunyai tanggung jawab hukum yang saling timbal balik, bahwa hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur disatu pihak, merupakan kewajiban debitur dilain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.

F. Metode Penelitian

Dalam memberikan paparan mengenai pengertian dari metode penelitian hukum, penulis menggunakan pendapat para ahli hukum, penulis menggunakan metode penelitian berupa penelitian, pengumpulan data dan analisis data.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika, pemikiran, pada metode yang mempunyai tujuan untuk memperoleh suatu atau beberapa gejala hukum, dengan cara menganalisisnya. Dan juga diadakan pemeriksaan mendalam

¹¹ Ferindoni, 2016, *Pelaksanaan Kredit Rumah Di PT. Bank BTN Tbk Pekanbaru*, Pekanbaru : JOM Fakultas Hukum Volume III, Hal.09.

terhadap faktor hukum dan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang muncul di dalam gejala yang bersangkutan¹².

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dan sistematis dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yang bersifat normatif yaitu suatu penelitian hukum yang mempunyai sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan mengacu pada segi yuridis. Dan pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Pendekatan doktrinal yang bersifat normatif karena yang diteliti adalah aspek hukum, asas hukum, kaedah hukum terhadap isi dari Perjanjian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Utama Karya – Boyolali dengan melihat hukum yang menyangkut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah Deskriptif. Dengan alasan bahwa jenis penelitian Deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas terhadap pemilihan tema atau topik permasalahan yang akan dianalisis dan dikaji dalam penelitian mengenai obyek yang akan diteliti, yaitu dengan

¹² Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.18.

mendeskripsikan bentuk dan isi terkait Perjanjian Kredit dengan Jaminan Serifikat Hak Atas Tanah di Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Boyolali.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Utama Karya Boyolali yang beralamat di Jalan Raya Ampel, Boyolali Nomor 05.

4. Bentuk dan Jenis Data

Dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan jenis dan Sumber data sebagai berikut yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹³.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- 3) PERMEN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi disempurnakan dengan PERMEN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 02/PER/M.KUKM/II/2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

¹³ Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal.8.

- 4) Bahan – bahan pustaka berupa literatur – literatur, artikel dan karya ilmiah yang dikutip berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa Akta Perjanjian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Utama Karya – Boyolali.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis dalam menyusun menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang – undangan , doktrin – doktrin dari para ahli hukum serta data – data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan obyek yang dikaji.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis kualitatif dengan penalaran deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau individual¹⁴. Memadukan antara penelitian lapangan berupa Perjanjian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Utama Karya - Boyolali dengan penelitian kepustakaan dan peraturan perundang – undangan berupa Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan doktrin – doktrin ahli hukum serta mengelola dan membandingkan data – data primer yang

¹⁴ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, Hal. 393.

telah diperoleh serta menarik kesimpulan, bahwa Perjanjian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Utama Karya – Boyolali sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan Perundang – undangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan sistematika penulisan, penelitian ini disusun secara sistematis agar mempermudah mempelajari dan memahami isi pembahasan dan hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini. Penulisan ini disusun dengan terdiri dari bab – bab. Yang mana antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan, dan setiap bab terdiri dari sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Kredit berdasarkan Undang –
Undang No.17 Tahun 2012
 - 1. Pengertian Kredit

2. Fungsi Kredit
3. Prinsip Kredit
4. Jenis Kredit
5. Prosedur Pemberian Kredit

B. Tinjauan Umum tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan
2. Obyek Jaminan
3. Macam – macam Jaminan
4. Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Kredit (Hak Tanggungan)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kontruksi hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak atas tanah di Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya – Boyolali.
- B. Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak atas tanah di Koperasi Utama Karya – Boyolali.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA